

LOKAKARYA PROGRAM PERINTISAN SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN PEDESAAN BERORIENTASI PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN AGROINDUSTRI PEDESAAN

TANGGAL, 1 - 2 AGUSTUS 1989

POLA PELATIHAN SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN PEDESAAN

oleh

Syamsuddin Abbas dan Soewono Atmowidjojo

PENYELENGGARA
YAYASAN BINA TARUNA TANI INDONESIA

dan
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1989

POLA PELATIHAN SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN PEDESAAN¹⁾

oleh

Syamsuddin Abbas²⁾ dan Soewono Atzowidjojo³⁾

I. PENDAHULUAN

Masyarakat adil makmur, merata dan sejahtera yang merupakan cita-cita Nasional akan tercapai bila pembangunan berjalan dengan lancar, konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Pengalaman serupa keberhasilan dan kegagalan dalam Pelita I s.d. IV banyak memberi pelajaran untuk melanjutkan pembangunan pada Pelita V dan seterusnya.

Keberhasilan Indonesia merubah dirinya dari negara importir beras terbesar di dunia menjadi negara yang berswasembada beras pada tahun 1984 lebih menambah dorongan dan semangat serta lebih meningkatkan kepercayaan diri untuk meraih keberhasilan pada bidang-bidang lainnya.

Tantangan yang menghadang di depan kita adalah antara lain pemerataan pembangunan beserta kenikmatan hasilnya, penciptaan lapangan kerja, pengendalian urbanisasi serta

1) Disajikan pada Lokakarya Program Perintisan SP3 berorientasi Pembangunan Pertanian dan Agroindustri Pedesaan, di IFB, tanggal 1-2 Agustus 1989.

2) Kepala Badan Diklatluh Pertanian Dep. Pertanian

3) Kepala Bidang Bina Program Diklat Pegawai, Badan Diklatluh Pertanian, Dep. Pertanian

peningkatan produksi komoditi non migas, pelestarian swasembada pangan dan peningkatan status gizi masyarakat.

Tantangan tersebut adalah mayoritas berlokasi di pedesaan, sehingga desa mutlak dijadikan medan juang dalam pembangunan. Desa hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga mempunyai daya tarik yang besar dan daya dorong ke kota mengecil.

Daya tarik desa adalah adanya kondisi yang memungkinkan cepatnya peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui peningkatan produksi, pengeolahan hasil dan pemasaran hasilnya yang sehat. Kegiatan yang meningkatkan nilai tambah, hendaklah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat pedesaan umumnya dan para produsen khususnya. Prasarana dan sarana di pedesaan ditingkatkan antara lain listrik, sehingga masyarakat pedesaan dapat menikmati siaran T.V, alat elektronika lainnya, lemari es; transportasi pedesaan yang lancar dengan tarif yang wajar.

Daya dorong ke kota adalah "iklim" yang menggelisahkan masyarakat pedesaan antara lain pungutan-pungutan liar, tidak adanya orang/lembaga tempat mengadukan nasib. Haruslah dihindari berkembangnya "perasaan sepi" yang melanda kaum tani dan masyarakat desa karena merasa tidak memiliki teman dan untuk berdialog, mengadukan kepentingan dan memperjuangkan aspirasi mereka dari berbagai masalah yang menyangkut dengan kehidupan mereka dan pembangunan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan kepemimpinan di pedesaan, baik pemimpin formal maupun non-formal. Pemimpin-pemimpin tersebut antara lain berfungsi sebagai penggerak pembangunan di pedesaan; penggerak masyarakat tani dan masyarakat pedesaan untuk membangkitkan proses pengembangan diri dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Salah satu cara menambah tenaga penggerak pembangunan di desa adalah upaya agar para sarjana dapat "masuk desa", melalui proyek Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3).

Agar mereka dapat berdaya guna dan berhasil guna optimal di pedesaan, maka perlu diberikan bekal melalui pelatihan dan bimbingan pasca latihan. Pola latihan dan pengembangan pasca latihan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

II. TUJUAN

Tujuan penempatan tenaga-tenaga Sarjana di pedesaan adalah untuk menjadi motivator dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia muda guna menciptakan lapangan dan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Ini berarti bahwa tenaga-tenaga tersebut perlu dibekali 3 (tiga) hal yang pokok:

- 1). Teknologi tepat guna di pedesaan
- 2). Kemampuan memotivasi
- 3). Sikap mental kemandirin dan jiwa pioner/pengabdian.

Untuk memenuhi hal yang pertama dan kedua bisa dilakukan dengan melatih mereka sesuai dengan potensi desa dimana mereka akan ditempatkan, disamping hal-hal yang bersifat umum yang hidup di setiap pedesaan.

Sedangkan untuk memenuhi hal yang ketiga perlu usaha-usaha penelusuran minat bagi para pelamar (sarjana).

III. PROSEDUR RECRUITMEN

Seleksi bagi pada calon adalah tahapan yang sangat penting untuk dapat menjamin mereka betah tinggal di pedesaan. Oleh karena itu persyaratan tertentu diperlukan antara lain:

- 1) Mereka berasal dari keluarga yang tinggal di pedesaan, atau setidaknya-tidaknya dalam hidupnya pernah tinggal di pedesaan;
- 2) Taat pada agama dan bersih diri, lulus 2 tahun sebelum tahun 1989 (1986/1987). Biasanya mereka akan memanfaatkan kesempatan serupa ini dengan sungguh-sungguh;
- 3) Menguasai salah satu cabang kesenian sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat pedesaan;
- 4) Diadakan test untuk mengetahui wawasan mereka tentang kehidupan di pedesaan;
- 5) Diadakan psycho test untuk melihat minat, sikap dan dedikasi sebagai tenaga pioner dan sikap kemandirian;
- 6) Tim 5 SP3, mempunyai latar belakang sebagai berikut:

- | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----|
| 6.1. Motivator | - | Sarjana Ilmu Komunikasi-Sospol | |
| (1) | - | Sarjana IAIN | |
| | - | Sarjana IKIP | |
| 6.2. Teknokrat | - | Sarjana Pertanian | (1) |
| (4) | - | Sarjana Teknik | (1) |
| | - | Sarjana Kesehatan Masyarakat | (1) |
| | - | Sarjana Ekonomi/Koperasi | (1) |

Komposisi ini diperlukan untuk mereka dapat menumbuhkan kerjasama sebagai Tim, memenuhi aspek kehidupan di wilayah pedesaan.

IV. POLA LATIHAN SARJANA SEBELUM DITEMPATKAN DI PEDESAAN

Sebelum ditugaskan di pedesaan mereka perlu dilatih lebih dahulu untuk mendapatkan gambaran kehidupan di pedesaan dan kegiatan-kegiatan yang ingin ditumbuhkan. Bentuk latihannya harus disesuaikan dengan pesertanya. Mereka adalah sarjana yang tentunya sudah banyak dibekali dengan cara berpikir dan menganalisa sesuatu.

Oleh karena itu workshop adalah satu metoda yang cocok untuk mereka ini dengan hasil akhir, mereka membuat program kerja pengembangan pedesaan. Dengan cara ini dari awal mereka diajak masuk ke dalam pedesaan dengan pikiran-pikiran yang konkrit.

Jadi pelaksanaannya dibagi 3 (tiga) tahap, yaitu:

Tahap 1 diberikan informasi-informasi tentang pedesaan, organisasi, lembaga-lembaga dan sebagainya;

Tahap 2 tinggal bersama masyarakat desa di pedesaan dengan tugas tugas khusus, antara lain melihat potensi pedesaan, kemungkinan-kemungkinan pengembangan potensi tersebut dan cara-cara yang tepat/efektif untuk menggerakkan/memotivasi masyarakatnya;

Tahap 3 kembali ke kelas untuk bersama-sama pelatih menyusun program kerja masing-masing.

Dengan cara ini betul-betul latihan bersifat pembekalan bagi mereka yang akan ditugaskan. Adapun pola pengembangan pasca latihannya dapat ditempuh dengan berbagai metoda, antara lain:

- 1) Mengikuti latihan lanjutan untuk menerima hal-hal baru;
- 2) Pertemuan-pertemuan periodik untuk memecahkan permasalahan antar mereka;
- 3) Setelah 1 tahun bertugas mereka dilatih tahap kedua, yaitu latihan pemecahan masalah (problem solving).

Latihan gabungan dengan petugas-petugas lain untuk membina jiwa kerjasama dan menyusun program bersama (integrated training program). Latihan macam nomor 3 ini yang paling efektif hasilnya sekalipun kadang sulit pelaksanaannya.

- 4) Latihan bagi pemuda pedesaan, untuk membekali ketrampilan yang dapat dikembangkan di tingkat pedesaan.

V. KURIKULUM YANG BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN

Kurikulum berdasarkan kebutuhan adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan kebutuhan ketrampilan orang yang akan dilatih. Untuk melaksanakan tugasnya seseorang memerlukan ketrampilan tertentu. Ketrampilan-ketrampilan yang belum dikuasai dan sangat diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan itulah yang perlu dilatihkan.

Apabila kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan tersebut dinamakan kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan.

Untuk memperoleh kurikulum seperti itu perlu diketahui terlebih dahulu:

- 1) Kemampuan Kerja Patokan (standar) disingkat dengan KKP
- 2) Kemampuan Kerja Nyata (yang mereka kuasai saat ini) KKN.

J a d i kebutuhan latihan adalah KKP - KKN =

= Kebutuhan Latihan atau
Diskrepansi Kemampuan
Kerja.

Karena tenaga ini belum tajam tugas-tugasnya secara konkrit dan belum jelas pula kemampuan yang dikuasai dalam melaksanakan tugasnya nanti, maka kebutuhan dapat dicari atau diangkat dari program-program pembangunan di pedesaan. Disamping itu tentu pengetahuan dasar yang diperlukan untuk petugas di pedesaan sudah dapat dirumuskan terlebih dahulu, misalnya:

- 1) Sosiologi pedesaan;
- 2) Pemerintahan di desa;

- 3) Peranan dan fungsi adat istiadat di dalam kehidupan masyarakat desa;
- 4) Peran kelompok organisasi sosial di pedesaan;
- 5) dan sebagainya.

Hal ini semua sebagai bahan informasi bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya nanti.

Disamping itu Departemen Pertanian telah mempunyai modul-modul maupun paket-paket ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh sarjana ini nantinya bila mereka membutuhkan. Modul-modul dan paket-paket ketrampilan ini dapat diperoleh dari UPT Diklat Pertanian yang tersebar di setiap propinsi. Uraian materi secara terinci dapat dilihat pada lampiran 2.a, 2.b, dan 2.c.

VI. PENGORGANISASIAN PELATIHAN

Sesuai dengan tujuannya latihan serupa ini perlu diorganisir secara tepat dan dilaksanakan oleh instansi yang telah banyak pengalaman dalam menyiapkan tenaga yang akan ditugaskan di wilayah pedesaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Tempat berlatih.

Tempat berlatih sebaiknya mendekati alam nyata dimana mereka akan bertugas. Jadi sedapat-dapatnya di pedesaan atau instansi yang dekat dengan pedesaan, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), BIP (Balai Informasi Pertanian, BLPP (Balai Latihan Pegawai Pertanian) dan sebagainya

yang sejenis dari instansi lain. Daftar UPT Departemen Pertanian lampiran 3.a, 3.b, dan 3.c.

2) Tenaga Pelatih

Tenaga pelatih sebaiknya yang betul profesional, artinya tenaga-tenaga yang betul-betul mengalami kehidupan serupa itu. Bukan semata-mata teori. Para peserta ini sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang teori, mereka sudah cukup banyak tahu, yang penting bagi mereka bukan lagi apa dan mengapanya tetapi adalah bagaimananya.

3) Dalam mengorganisir latihan, ini perlu diadakan semacam TOT (Training of the Trainers) bagi para tenaga yang akan menjadi instruktur. Hal ini sangat diperlukan agar jangan sampai misi proyek ini diabaikan.

Semua tenaga instruktur ini harus bersama-sama menanamkan betapa penting dan mulyanya tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh para sarjana ini.

Untuk itu tentu TOT ini harus betul-betul menghayati makna tugasnya, tidak saja mentransfer pengetahuannya. Di sinilah letak pentingnya diadakan TOT terlebih dahulu (cukup dengan waktu 1 minggu). Untuk jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 4.

Kualifikasi instruktur adalah sebagai berikut:

Instruktur terdiri dari berbagai petugas sesuai dengan materi yang dilatihkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Menguasai materi yang akan dilatihkan;

- 2) Menggunakan alat bantu berlatih;
- 3) Menyiapkan kasus-kasus sebagai bahan diskusi dari masing-masing materi yang diajarkan;
- 4) Bersedia untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap kemandirian;
- 5) Menyiapkan bahan/tulisan materi yang dilatihkan;

Sebagai nara sumber petugas-petugas dari:

- 1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Departemen Dalam Negeri;
- 3) Departemen Pertanian;
- 4) Departemen Perindustrian;
- 5) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 7) Pendidikan Tinggi;
- 8) Perbankan (BRI).

VII. PENGEMBANGAN PASCA LATIHAN

Pengembangan pasca pelatihan sangat diperlukan karena nantinya akan banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh para sarjana ini setelah bertugas di lapangan. Paling tidak mereka memerlukan tempat untuk mengkomunikasikan permasalahan dalam mendapatkan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi pemecahannya. Oleh karena itu diperlukan adanya:

- 1) Suatu tim di daerah untuk memberikan bimbingan lanjut;

- 2) Perlu diadakan temu konsultasi rutin antar mereka sesama peserta di tingkat wilayah (regional)'
- 3) Perlu adanya pertemuan nasional untuk membahas permasalahan tukar pengalaman, penyusunan program-program nasional. Pertemuan semacam ini dapat dimanfaatkan untuk refresher course, menambah teknologi baru, kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan;
- 4) Perlu adanya terbitan berkala dari instansi Pusat (Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, Dep. Dikbud) yang dapat memberi informasi-informasi baru baik dari pusat maupun dari pengalaman rekan-rekan yang bertugas di daerah lain;
- 5) Pada saat tertentu perlu instruktur mendatangi mereka untuk memberikan bimbingan dan motivasi sesuai dengan materi yang dilatihkan;
- 6) Penghargaan bagi mereka yang sukses melaksanakan tugasnya perlu dirancang, dengan memberikan kemudahan untuk meningkatkan ketrampilannya dan penghargaan-penghargaan lain yang mendorong meningkatkan pengabdianya;
- 7) Kiranya tidak kalah pentingnya mereka itu dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
- 8) Tersebarinya tenaga-tenaga penyuluh pertanian beserta kelembagaannya yang berada di tingkat desa dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengembangkan. BPP

(Balai Penyuluhan Pertanian) dengan sistem kerja latihan dan kunjungannya akan sering dan dapat disinkronkan dengan usaha sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Khusus untuk daerah yang miskin telah tersedia petunjuk pola P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil) yang juga dapat dimanfaatkan.

VIII. PENUTUP

Dalam Pelita V ini, harus dimantapkan basis pembangunan pedesaan agar kita dapat tinggal landas pada Pelita VI yang akan datang. Minimal sembilan basis pembangunan pedesaan yang perlu diperkuat, yakni tiga aspek kelembagaan; tiga aspek perencanaan dan tiga aspek manusianya.

Kelembagaan yang dimaksud adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok Tani-Nelayan.

Aspek perencanaan meliputi program penyuluhan pertanian termasuk koperasi ditingkat wilayah kerja BPP (WKPP), pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD sesuai prosedur dan jadwal, dan Rencana Usahatani Kelompok antara lain Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bila ketiga Rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka terwujudlah kombinasi optimal perencanaan dari bawah (bottom-up planning) dengan perencanaan dari atas (top down planning).

Faktor manusia adalah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mereka merencanakan, mereka melaksanakan, mereka mengawasi dan menilai serta mereka yang menikmati hasilnya atau merasakan pahitnya bila gagal pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketiga faktor manusia tersebut adalah para Penyuluhan Pertanian Urusan Program (PPUP), Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL), Pengurus dan Manajer KUD serta Kontak Tani Nelayan.

Karenanya diharapkan para SP3 hendaklah memberikan perhatian pada sembilan unsur basis pembangunan pedesaan tersebut disamping perhatian kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Kader Pembangunan Desa (KPD).

Keberhasilan misi SP3 akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah pembangunan pertanian dan pedesaan. Bagi peserta SP3 pribadi akan merupakan proses pematangan dan pementapan diri dalam mengarungi samudera kehidupan di masa mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kemudahan dalam mengisi kemerdekaan negara R.I yang berdasarkan Pancasila yang kita cintai ini.

Jakarta, Juli 1989

P e n u l i s

Lampiran 1.

TAHAPAN DAN JENIS LATIHAN

No.	Tahapan latihan (Tahap I, II, III, dan IV)			
	I	II	III	IV
1.	Latihan Pra Tugas (Dasar I)	1. Lat. Lanjutan (Dasar II)	1. Lat. Lanjutan (Dasar III)	1. Lokakarya "Evaluasi penerapan hasil lat."
2.	Waktu: 4 minggu	2. Waktu: 2 minggu	2. Waktu: 1 minggu	2. Waktu: 3 hari
3.	Lokasi: di Pusdiklat Propinsi	3. Lokasi: di Pusdiklat Propinsi	3. Lokasi: di Pusdiklat Propinsi	3. Lokasi: di Pusdiklat Propinsi
4.	Tujuan: membekali peserta untuk dapat bekerja di pedesaan	4. Tujuan: membekali ketrampilan problem solving (pemecahan masalah)	4. Tujuan: latihan gabungan antara petugas-petugas di daerah yang terkait dalam pembangunan pedesaan untuk menumbuhkan komitmen bersama	4. Tujuan: melihat hasil pengabdian dan menyusun program kerja lanjutan
5.	Selesai bertugas di lapangan 9 bulan mereka harus mengikuti latihan tahapan berikutnya, yaitu latihan dasar II selama 2 minggu	5. Selesai selesai latihan ini 9 bulan kemudian mengikuti latihan Dasar III selama 1 minggu	5. Tujuh bulan kemudian diadakan latihan/lokakarya evaluasi penerapan hasil latihan (evaluasi pengabdian).	

Lampiran 2 a.

MASYARAKAT DESA : - BABASAN BARU
- TATA KERJA

No. Pemerintahan Desa	Dik. Lat Sosial, Mental-Spiritual	Kesehatan Diri	Praperana
1. Sistem pemerintahan di tingkat desa	1. Peran dan fungsi kelembagaan sosial di pedesaan	1. Lingkungan hidup di pedesaan	1. Monografi daerah pedesaan
2. Peran tokoh-tokoh pedesaan sebagai aktivator.	2. Kritisasi-kritisasi kesadaran sebagai media pratubuhan.	2. Kependudukan dan lembaga-lembaga kesehatan.	2. Potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.
3. Pejabat-pejabat di tingkat desa sebagai inovator (tenaga pembaharuan).	3. Lembaga pendidikan keagamaan dan adat istiadat.	3. Kelembagaan yang menunjang kesehatan, pola konsumsi.	
4. Program pembangunan di tingkat pedesaan.			

Lampiran 7 c

BEKERJA BERSAMA RELAJAR

Tujuan yang bermanfaat	Diptakan lapangan kerja	Teladan bagi masyarakat
1. Meningkatkan cara kerja yang ada di pedesaan dengan metode yang lebih efektif, sederhana dan mudah dilaksanakan.	1. Memanfaatkan limbah pertanian	1. Partisipasi terhadap kegiatan di pedesaan.
2. Memperkenalkan cara produksi yang berorientasi pada pasar.	2. Membuat usaha bersama (kebun bersama, penerangan (listrik) dsb.	2. Menumbuhkan sikap mengutamakan kerjasama dari pada persaingan yang tidak sehat.
3. Form recording/pencatatan usahatani.	3. Melatihkan ketrampilan yang dapat menambah penghasilan (montir sepeda motor, radio, dsb).	
4. Membuat rencana usaha bersama.		

Lampiran 3.b

DUNIA KAREKTER, KEDAPATAN DAN R.P.P.
TANPA ANGGARAN 1993/1994

No. Propinsi	Kepercayaan	Kecamatan	WFOE	WEP	DIKURUSI SISWA (MPP/ABRI)	LAIN- LAIN	Jumlah	Proporasi 80/90 (%)	Keadaan 80/90
1. Jawa Barat	29	448	195	0	18	17	234	0	234
2. Jawa Tengah	31	492	50	30	45	9	157	0	157
3. Jawa Timur	20	551	44	32	27	57	225	0	225
4. Sul. Selatan	77	144	41	40	9	0	90	4	94
5. D.I. Yogyakarta	5	67	9	4	4	0	19	0	19
6. D.I. Aceh	9	109	24	23	7	0	57	2	59
7. Sumatera Utara	12	167	37	35	0	0	92	2	94
8. Sumatera Barat	14	85	22	22	8	10	64	7	70
9. Sumatera Selatan	10	97	20	14	7	16	57	7	64
10. Lampung	4	70	15	13	0	1	29	2	31
11. Bali	8	51	24	3	0	2	31	0	31
12. Kalimantan Barat	7	85	28	14	4	0	46	2	48
13. Kalimantan Selatan	10	80	25	17	4	0	46	2	48
14. Riau	4	33	0	29	0	0	29	5	34
15. Jambi	6	38	0	25	3	0	28	5	33
16. Bengkulu	4	24	0	22	1	4	27	3	30
17. DKI Jakarta	4	14	0	9	1	0	9	0	9
18. Kalimantan Tengah	6	50	0	16	9	2	27	0	27
19. Kalimantan Timur	6	35	0	23	0	2	25	5	30
20. Sulawesi Utara	6	70	0	40	3	5	48	7	55
21. Sulawesi Tengah	4	40	0	28	0	1	29	7	36
22. Sulawesi Tenggara	4	37	0	22	0	9	31	2	33
23. N.T.B.	6	59	32	10	0	0	42	5	47
24. N.T.T.	12	134	0	47	3	1	51	4	55
25. Maluku	5	33	0	19	0	1	20	4	24
26. Irian Jaya	9	14	0	23	0	0	23	10	33
27. Timor Timur	13	14	0	4	8	4	16	5	21
INDONESIA	273	3.037	597	651	227	134	1.611	76	1.687

e) 100% Proyek WEP

Aspirasi B.2. Daftar Balai Informasi Pertanian (BIP) di seluruh Indonesia,
Lokasi dan Wilayah Kerjanya.

No.	P.I.P.	L o k a s i		Wilayah Kerja
		Kodys Mah.	Kecamatan	
1.	Ar e t	Banda Aceh	Syiah Kuala	Prop. Aceh
2.	Susatera Utara	Medan	Medan Johor	Prop. Sumatera Utara
3.	R i a u	Kampar	Siak Mulu	Prop. Riau
4.	Susatera Barat	Padang	Padang Barat	Prop. Sumatera Barat
5.	Jasbi *)	Jasbi	Kota Baru	Prop. Jasbi
6.	Bengkulu *)	Bengkulu	Tanjung Agung	Prop. Bengkulu
7.	Susatera Selatan *)	Musi Bangsasin	Talang Kelapa	Prop. Sumatera Selatan
8.	Lampung	Lampung Selatan	Natar	Prop. Lampung
9.	BKI Jakarta *)	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Prop. DKI Jakarta
10.	Jawa Barat	Bandung	Lembang	Prop. Jawa Barat
11.	Jawa Tengah	Sebang	Ungaran	Prop. Jawa Tengah
12.	Yogyakarta *)	Sleman	Ngasplak	Prop. D.I. Yogyakarta
13.	Jawa Timur	Surabaya	Monorolo	Prop. Jawa Timur
14.	B a l i *)	Badung	Denpasar Selatan	Prop. Bali
15.	Kalimantan Barat *)	Pontianak	Pontianak Utara	Prop. Kalimantan Barat
16.	Kalimantan Selatan	Banjir	Martapura	Prop. Kalimantan Selatan
17.	Kalimantan Tengah *)	Palangkaraya	Pahandut	Prop. Kalimantan Tengah
18.	Kalimantan Timur *)	Samarinda	Samarinda Ilco	Prop. Kalimantan Timur
19.	N.T.B.	Leshok Barat	Naradono	Prop. N.T.B.
20.	N.T.T. *)	Kupang	Kupang Tengah	Prop. N.T.T.
21.	Sulawesi Selatan	Ujung Pandang	Biring Kanaya	Prop. Sulawesi Selatan
22.	Sulawesi Tenggara *)	Kondari	Mandonya	Prop. Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah *)	Donggala	Sia Maru	Prop. Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Utara *)	-	Pindong	Prop. Sulawesi Utara
25.	M a l u k u	Ambon	Teluk Ambon Baguala	Prop. Maluku
26.	Irian Jaya *)	Jayapura	Sentani	Prop. Irian Jaya
27.	Timor Timur	Dili	Dili Barat	Prop. Timor Timur
28.	Ciawi	Rogor	Ciawi	Nasional

Catatan: Status Proyek Informasi Pertanian (PIP)

PEWELIHAHAN PELATIHAN

TAMPAK LATIHAN	TUJUAN	LOKASI	PELATIH	HASIL
I. Latihan TDT bagi calon Instruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. membekali mereka terhadap tujuan, misi proyek serjana penggerak pembangunan pedesaan 2. merancang metode yang tepat untuk pelatihan 3. menyiapkan materi latihan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. 4. menyusun instruksi evaluasi untuk mengukur keberhasilan berlatih. 5. merancang khibingan pasca latihan. 	1. Di Jakarta (2 minggu)	1. Nara Suster/ tenaga-tenaga ahli dari berbagai Departemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. konsep rancangan materi dan metode latihan bagi masing-masing instruktur. 2. Instrumen evaluasi hasil berlatih 3. Konsep khibingan ber-berlanjut.
II. Latihan tenaga serjana penggerak pembangunan pedesaan (latihan Dasar I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. membekali mereka untuk dapat mempraktikkan masyarakat di pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 2. menumbuhkan sikap partisipasi dan kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja. 3. merancang program pembangunan di tingkat pedesaan. 	1. UPT Sukat Pertanian di tingkat Propinsi	1. Tenaga-tenaga yang telah mengikuti TDT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan dan program kerja di tingkat pedesaan. 2. Tumbuhnya sikap dedikasi yang kuat untuk membangun di tingkat pedesaan. 3. kesiapan untuk bekerja dan hidup bersama masyarakat pedesaan.
III. Latihan Bagi Pemuda Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. membekali ketrampilan yang konkrit sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya (pertanian, industri, pelayanan, dll.) 2. menumbuhkan sikap mau ber-jamah payah dan kemandirian. 3. menumbuhkan cara kerja kelompok. 	1. Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan	1. Tim yang 5 org.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing pemuda yang mempunyai proyek proyek khusus, sesuai dengan minat dan kemampuannya. 2. Kecepatan pola kerja kelompok

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. _____, Program Umur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 1989-1994. (Tap II/Munas III/HKTI/1989) Caringin, Bogor.
2. Syamsuddin Abbas, Penyuluhan Pertanian dan Basis Pembangunan Pedesaan, Jakarta, 1989.
3. _____, Pedoman Penyusunan Kurikulum Kompetensi Kerja, Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian, Jakarta, 1984;
4. Soewono A., Motivasi, Jakarta, 1980
5. _____, Pedoman Umum Proyek Rintisan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3), Desaku yang kucinta, Desaku yang permai. Kelompok Kerja Proyek SP3, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga; Proyek Rintisan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan, Jakarta, 1989.

DISKUSI**1. Pokok-Pokok Pemikiran Pemrasaran****Margono Slamet**

- (1) Program SP3 Perlu mendapat sambutan yang baik karena program ini dapat memberikan suatu pemecahan masalah dalam meningkatkan pembangunan. Akan tetapi tujuan program perlu dirumuskan secara jelas dan tegas karena akan digunakan sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- (2) Status sarjana peserta Program SP3 harus jelas. Ada tiga alternatif:
 - a. Sarjana akan diberikan santunan dari Pemerintah selama 2 tahun. Penempatan sarjana tersebut disesuaikan dengan wilayah administratif Pemerintahan, maka timbul persepsi bahwa sarjana yang akan terjun ke pedesaan identik dengan BUTSI.
 - b. Status sebagai "wiraswasta" yang berupaya menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri sekaligus memberikan pekerjaan bagi orang lain di desa.
 - c. Merupakan kombinasi kedua alternatif tersebut di atas.
- (3) Pola Pelatihan kepada Sarjana-sarjana tersebut tergantung:
 - a. Tujuan program SP3
 - b. Status peserta

c. Kondisi dan Potensi daerah tempat tugas para sarjana tersebut

(4) Sebelum rekrutmen dan pelatihan dilakukan, perlu dijawab dua pertanyaan mendasar :

a. Apa yang ingin dilakukan oleh Sarjana Program SP3 di desa ?

b. Apa yang dapat dilakukan oleh Sarjana Program SP3 di desa ?

Sehubungan dengan itu perlu kejelasan pengertian tentang Konsep "Pembangunan Pedesaan dan Konsep "Menggerakkan Pembangunan Pedesaan".

Batasan pembangunan pedesaan harus "bertahap". Mulai dari pembangunan pertanian dan Agroindustri perlu dirumuskan dengan jelas dan dimana akan diterapkan karena hal ini tergantung lokasi. Untuk itu diperlukan sarjana yang memiliki minat, kemampuan, dan keahlian di bidang produksi pertanian, industri pertanian, dan sosial-ekonomi pedesaan.

(5) Diperlukan satuan kerja untuk menyeleksi para sarjana tersebut dan seleksi harus jelas kualifikasinya, yakni:

a. Sesuai kebutuhan tiap wilayah

b. Punya modal dasar, skill, pengalaman yang relevan, minat bekerja di pedesaan, dan motivasi yang kuat.

c. Pengalaman ikut KKN.

d. Rekomendasi.

- (6) Tujuan umum pelatihan adalah dapat melaksanakan tugas dan peranannya secara baik. Materi pelatihan bersifat terapan dan praktis, seperti teknologi yang diperlukan, perubahan sosial dan komunikasi dan ekonomi pembangunan.

Syamsuddin Abbas dan Soewono Atmowidjojo

- (1) Menempatkan sarjana di desa-desa dapat dilakukan dengan Teori Dorong Tarik. Daya Tarik desa dapat memungkinkan cepatnya peningkatan pendapatan masyarakat. Daya dorong ke kota berupa yang "menggelisahkan" warga desa.
- (2) Tujuan penempatan tenaga sarjana di pedesaan adalah sebagai motivator dengan syarat-syarat:
- a. Berasal dari keluarga pedesaan atau pernah di desa.
 - b. Telah lulus, paling cepat 2 tahun.
 - c. Ketaatan beragama yang cukup tinggi.
 - d. Ada jiwa seni.
 - e. Lulus tes.
- (3) Pola pelatihan.
- a. Pola Umum
 - b. Latihan aparat
 - c. Menjalani masa tugas 2 tahun dan diadakan evaluasi.
 - d. Pelatihan bagi pemuda.

- (3) Saya tidak setuju ada training dan pelatihan terlebih dahulu karena hanya akan memakan waktu saja. Sarjana terjun saja dulu ke pedesaan, masalah yang tidak sesuai dengan profesinya dapat ditanyakan pada sarjana-sarjana yang ada di kabupaten. Ada semboyan: "Kalian tidak ada rotan, akar pun berguna". Kalian tidak ada sarjana pertanian, sarjana lainpun bisa.
- (2) Harapan Pemerintah dari Generasi muda (sarjana SP3):
 Ilmu yang telah diperoleh di kota dapat dipraktikkan di desa.
 membangun pedesaan.
 tetapi dapat berhasil dengan motivasi yang kuat untuk Setiap sarjana tidak mempunyai bobot yang sama, bukan sebagai pembaharuan
 b. SP3 ada yang bekerja untuk dirinya sendiri tetapi dapat tertampung.
 sedang kenyataannya nanti tidak semua pencari kerja a. SP3 tujuannya mengatasi masalah, pembangunan, (1) Saya berbeda pendapat dengan Marono Slamet:

M.P. Napitupulu

2. Pembahasan

- (4) Pola pelatihan perlu disesuaikan dengan misi SP3:
 a. Masyarakat memperoleh lapangan kerja baru.
 b. Mengurangi pembangunan di pedesaan.

- (4) Persyaratan SP3 jangan terlalu dibatasi (ketat) tetapi ditekankan kepada yang punya perhatian pada pembangunan pedesaan.

Aida V. Hubeis

- (1) Tampaknya belum ada kesesuaian antara Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga tentang tujuan Program SP3.
- (2) Sarjana Program SP3 perlu diberikan training/pelatihan agar nantinya dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (3) Tulisan Bapak Syamsuddin tentang sembilan basis pembangunan pedesaan dapat sebagai input bagi Program SP3 karena belum ada dalam buku Juklak SP3.
- (4) Bagaimana Operasionalisasi SP3 setelah sampai di lapangan ? Belum dijelaskan Terpenting Sarjana Program SP3 maupun sebagai motivator di desa.
- (5) Perlu difikirkan kelanjutan kehidupan sarjana SP3 setelah habis waktunya bertugas di desa.

3. Tanggapan Pemerasaran atas Pembahasan

Syamsuddin Abas

- (1) Sependapat dengan pembahas ke 2 dan (Aida Vitayala V.S. Hubeis) bahwa sarjana untuk Program SP3 sebelum terjun ke lapangan diberikan latihan dasar yang tujuannya membekali mereka agar mampu menggerakkan

masyarakat pedesaan dan menumbuhkan sikap partisipasi serta kemandirian.

(2) Disamping itu TOT juga perlu diberikan untuk calon instruktur dan "penajaman" tujuan SP3 perlu dilakukan.

4. Tanya Jawab

Perbahasan/Perbahasan		Jawab/Tanggapan	
Nama	Materi	Nama	Materi
<u>Dianara</u>	1. Dalam rekrutasi SP3 tidak perlu dibatasi dengan keserjanaan	<u>M. Slamet</u>	1. Setuju, SP3 tidak dibatasi keserjanaan tetapi dibatasi keprofesionalnya
	2. Saya prihatin, sarjana yang terjun ke desa tanpa bimbingan menjadi motivator		2. Memang perlu bimbingan untuk menjadi motivator agar dapat membangkitkan jiwa wirausaha betul di desa
	3. Sebaiknya SP3 diover atau dilaksanakan lembaga swadaya		3. Sebaiknya SP3 dikaitkan dengan lembaga swadaya yang sudah ada.
<u>Endang</u>	4. Training bagi SP3 tidak perlu, tetapi yang perlu kemampuan untuk mandiri, kebersamaan untuk menanggung resiko, dan kemampuan untuk bernegosiasi gagasan		
	5. SP3 dihadapkan pada 2 masalah, yaitu Program SP3 harus berjalan pada saat ini dan SP3 diharapkan berjangka panjang		
	6. Dalam banyak hal keterlibatan pemerintah dalam SP3 masih dominan. Pihak Swasta tampaknya perlu dilibatkan untuk memperluas cakrawala.		

Perumusan Hasil Diskusi

- (1) Pelatihan yang diberikan kepada SP3 adalah pembekalan dan pembinaan tambahan kepada setiap individu SP3 sesuai dengan peran dan tugas-tugas yang akan dilakukannya dalam menggerakkan produktivitas masyarakat pedesaan.
- (2) Orientasi dan program ditekankan kepada bidang pertanian, agroindustri, dan agribisnis sesuai dengan persoalan dan kebutuhan dimana SP3 berada.
- (3) Pola Pelatihan SP3 harus berdasarkan tujuan dan status SP3 yang tegas dan rinci. Disamping itu perlu dipahami bahwa SP3 adalah perintisan peranan generasi muda di pedesaan dan fungsi SP3 dapat diarahkan: (a) sebagai motivator, (b) sebagai penggerak produktivitas sumberdaya ekonomi masyarakat pedesaan dan (c) sebagai wiraswastawan.
- (4) Latarbelakang pendidikan SP3 perlu bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan seperti pertanian, sosial ekonomi, dan keagamaan. Disamping latarbelakang pendidikan, motivasi, minat, dan pemahaman terhadap desa adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam sistem rekrutmen SP3.
- (5) Profil SP3 harus mencakup:
 - a. Sikap mental, idealisme, dan kepeloporan

b. Memiliki kemampuan memotivasi dan bekerjasama secara kooperative

c. Memiliki kemampuan manajerial dan teknis.

- (6) Model pelatihan melalui pentahapan: pengenalan kondisi desa - problem solving - pengalaman teknis lapangan - program operasional. Pelatihan bersifat workshop. Pasca latihan perlu dilanjutkan dan penyampaian informasi, monitoring, dan evaluasi.
- (7) Kurikulum Pelatihan SP3 harus sesuai dengan kebutuhan dan mencakup pengetahuan dasar dan rujukan tentang sosial budaya lokal, fungsi kepala desa dan lain-lain, dan pengetahuan dalam kaitan dengan SP3 (spesifik).
- (8) Perlu dilakukan "training of the trainers" benar-benar mencapai sasaran dan sesuai dengan output yang diharapkan.
- (9) Pelatihan SP3 sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang berpengalaman. Dalam hal monitoring dan bimbingan perlu satuan kerja yang operasional dan fungsional di pusat dan daerah. Ditetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap bimbingan, pembinaan, pengawasan SP3.